

Dinamika Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Kota Jambi: Antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Izhar Bafadhal¹, Kasful Anwar², Dedek Kusnadi³

Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Teknologi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi

E-mail: izharbafadhal16@gmail.com¹, kaspfulanwarus@gmail.com²

Article History:

Received: 07 Juli 2025

Revised: 01 Agustus 2025

Accepted: 18 Agustus 2025

Keywords:

Political
Dynamics; Islamic Education
Policy; Policy
Implementation; Regulatory
Gaps; Jambi City.

Abstract: Political dynamics and implementation of Islamic education policy in the decentralization era demonstrate the complexity of relationships between formal regulations and field realities. This research aims to analyze local political dynamics in policy formulation, implementation mechanisms, and gaps between regulations and Islamic education practices in Jambi City. The research method employs a qualitative approach with library research, analyzing primary and secondary literature from 2020-2025 through content analysis and thematic analysis to identify key patterns and themes. Research findings indicate that local political dynamics influence policy formulation through complex interactions among political elites, religious leaders, and Islamic community organizations that create political patronage systems. Policy implementation faces multidimensional challenges including limited human resource capacity, suboptimal institutional coordination, resistance to change, and economic disparities between regions. Implementation gaps are caused by policy designs that do not consider local condition heterogeneity, weak monitoring and evaluation systems, and political instability affecting policy consistency. Digital transformation and modernization demands create dilemmas between preserving traditional Islamic values and adapting to contemporary developments. This research concludes that improving Islamic education policy requires a holistic approach integrating stakeholder participation, strengthening implementation capacity, and developing evidence-based monitoring systems to bridge gaps between regulations and field realities.

Kata Kunci: Dinamika
Politik; Kebijakan Pendidikan
Islam; Implementasi
Kebijakan; Kesenjangan
Regulasi; Kota Jambi.

Abstrak: Dinamika politik dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di era desentralisasi menunjukkan kompleksitas hubungan antara regulasi formal dan realitas lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam formulasi kebijakan, mekanisme implementasi, dan kesenjangan yang terjadi antara regulasi dengan praktik pendidikan Islam di Kota Jambi. Metode

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research, menganalisis literatur primer dan sekunder periode 2020-2025 melalui content analysis dan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal mempengaruhi formulasi kebijakan melalui interaksi kompleks antara elit politik, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan Islam yang menciptakan sistem patronase politik. Implementasi kebijakan menghadapi tantangan multidimensional meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan yang tidak optimal, resistensi terhadap perubahan, dan disparitas ekonomi antar daerah. Kesenjangan implementasi disebabkan oleh desain kebijakan yang tidak mempertimbangkan heterogenitas kondisi lokal, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta ketidakstabilan politik yang mempengaruhi konsistensi kebijakan. Transformasi digital dan tuntutan modernisasi menciptakan dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dengan kebutuhan adaptasi perkembangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan partisipasi stakeholder, penguatan kapasitas implementasi, dan pengembangan sistem monitoring berbasis evidensi untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam era pasca-reformasi, terutama dalam konteks dinamika politik dan implementasi kebijakan pendidikan. Kompleksitas hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dan realitas lapangan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks daerah seperti Kota Jambi yang memiliki karakteristik sosio-politik dan keagamaan yang unik. Dinamika politik pendidikan Islam (*political dynamics of Islamic education*) tidak hanya melibatkan aspek regulasi formal, tetapi juga mencakup proses implementasi yang seringkali menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural di tingkat lokal (Ulum, 2023).

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan sejak era reformasi, yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi baru yang bertujuan mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam berkualitas yang berkeadilan dan berpihak kepada anak membutuhkan upaya menyeluruh dan sistemik yang termasuk penyelarasan kebijakan, penguatan strategi implementasi berkelanjutan berbasis data umpan balik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada mekanisme implementasi yang efektif (Hayi & Alwi, 2023).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia telah

mengalami berbagai fase perkembangan yang kompleks. Penelitian menghasilkan empat buah potret relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam selalu terkait dengan dinamika politik yang berlangsung. Dalam konteks ini, *policy implementation gap* menjadi isu krusial yang memerlukan analisis mendalam, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan yang telah diformulasikan di tingkat nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal (Hoddin, 2020).

Fenomena *educational governance* dalam pendidikan Islam menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan Islam. Tata kelola pendidikan Islam (*Islamic education governance*) memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks Kota Jambi, dinamika ini menjadi semakin kompleks karena adanya karakteristik lokal yang unik, baik dari aspek demografi, budaya, maupun struktur sosial-politik yang ada (Pasaribu, 2021).

Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat daerah menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Dinamika regulasi sekolah berstandar internasional di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam implementasi dan dampaknya terhadap lembaga pendidikan Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks regulasi yang lebih luas dan dampaknya terhadap ekosistem pendidikan Islam secara keseluruhan (Darmansah & Ramadhani, 2025).

Studi kontemporer mengenai *Islamic education policy* juga menunjukkan pentingnya analisis terhadap peran institusi pendidikan tinggi dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas. Penelitian bertujuan mengidentifikasi tren studi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, yang kemudian menganalisis peran universitas dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas sesuai target agenda SDGs. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam saat ini tidak hanya terkait dengan aspek regulasi tradisional, tetapi juga dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang lebih luas (Kurniasih et al., 2025).

Konteks Kota Jambi menjadi menarik untuk dikaji karena memiliki dinamika pendidikan Islam yang unik. Urbanisasi Islam dan meningkatnya preferensi terhadap sekolah Islam terpadu di Kota Jambi menunjukkan fenomena yang menarik untuk dianalisis. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam pendidikan Islam di tingkat lokal yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan formal yang ada.

Aspek *decentralization* dalam pendidikan Islam juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika politik dan kebijakan pendidikan Islam di daerah. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Namun, implementasi desentralisasi ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan.

Penelitian tentang dinamika organisasi lembaga pendidikan Islam menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan institusi pendidikan Islam. Studi menentukan peran pesantren, organisasi, dan keberadaan pendidikan tinggi dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pendidikan Islam tidak hanya melibatkan aspek kebijakan formal, tetapi juga peran berbagai organisasi dan lembaga yang ada dalam ekosistem pendidikan Islam.

Quality assurance dalam pendidikan Islam juga menjadi isu penting yang terkait dengan implementasi kebijakan. Sistem penjaminan mutu pendidikan Islam memerlukan standar yang

jelas dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Dalam konteks ini, gap antara regulasi dan realitas lapangan seringkali menjadi kendala utama dalam memastikan kualitas pendidikan Islam yang optimal.

Fenomena *institutional isomorphism* dalam pendidikan Islam juga menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan Islam cenderung mengadopsi praktik dan struktur yang sama dalam merespons tekanan regulasi dan lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi inovasi dan kreativitas dalam pengembangan pendidikan Islam di tingkat lokal.

Kajian tentang politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya evolusi paradigma dalam memahami kompleksitas hubungan antara politik, kebijakan, dan implementasi pendidikan Islam. Studi politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya masih belum secara komprehensif menganalisis dinamika implementasi kebijakan di tingkat kota dengan fokus pada gap antara regulasi dan realitas lapangan.

Penelitian tentang dinamika kelembagaan pendidikan Islam menunjukkan pentingnya analisis multi-level dalam memahami kompleksitas sistem pendidikan Islam. Studi-studi sebelumnya cenderung fokus pada analisis makro atau mikro, namun belum banyak yang mengintegrasikan kedua level analisis tersebut dalam konteks spesifik kota atau daerah tertentu. Hal ini menciptakan celah penelitian yang perlu diisi untuk memahami dinamika yang terjadi di tingkat meso.

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah melalui pendekatan analisis integratif yang menggabungkan perspektif *policy analysis*, *political dynamics*, dan *implementation studies* dalam konteks spesifik Kota Jambi. Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) analisis mendalam tentang dinamika politik lokal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan Islam; (2) identifikasi faktor-faktor kontekstual yang menciptakan gap antara regulasi dan realitas lapangan; dan (3) pengembangan model analisis implementasi kebijakan pendidikan Islam yang dapat diterapkan dalam konteks kota-kota lain di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur di atas, permasalahan utama penelitian ini adalah: "Bagaimana dinamika politik dan kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi dalam konteks hubungan antara regulasi formal dan realitas implementasi di lapangan?" Permasalahan ini meliputi aspek-aspek: (1) faktor-faktor politik yang mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islam; (2) mekanisme dan proses implementasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat kota; dan (3) gap yang terjadi antara regulasi formal dan praktik implementasi di lapangan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama yang akan menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana dinamika politik lokal di Kota Jambi mempengaruhi proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islam, serta faktor-faktor politik apa saja yang berperan dalam membentuk arah dan orientasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat kota?

Kedua, bagaimana mekanisme dan proses implementasi kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi berlangsung, termasuk peran berbagai aktor dan institusi dalam proses implementasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerjemahkan kebijakan formal menjadi program dan kegiatan konkret di lapangan?

Ketiga, sejauh mana terdapat kesenjangan (*gap*) antara regulasi formal kebijakan pendidikan Islam dengan realitas implementasi di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam di Kota Jambi?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika politik dan kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi dengan fokus pada hubungan antara regulasi dan realitas lapangan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh dinamika politik lokal terhadap formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi; (2) mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme serta proses implementasi kebijakan pendidikan Islam, termasuk peran berbagai aktor dan institusi yang terlibat; dan (3) mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan yang terjadi antara regulasi formal dengan realitas implementasi, serta faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut.

Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan pendidikan Islam. Dari aspek teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang politik dan kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam konteks implementasi di tingkat lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks Indonesia. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dan kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder. Metode penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif terhadap fenomena yang dikaji tanpa terikat oleh batasan geografis dan temporal yang ketat. Pendekatan ini memberikan keleluasaan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan empiris yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya dalam konteks yang relevan dengan topik penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analitis yang mengutamakan kedalaman analisis terhadap data tekstual daripada generalisasi statistik. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu dinamika politik dan kebijakan yang bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa-nuansa halus dalam hubungan antara regulasi formal dan realitas implementasi yang sulit diungkap melalui pendekatan kuantitatif (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022)

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025, khususnya yang membahas politik dan kebijakan pendidikan Islam, implementasi kebijakan pendidikan, dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, laporan evaluasi program pendidikan Islam, dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait yang memberikan konteks empiris bagi analisis teoretis yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *purposive sampling* terhadap literatur yang relevan dengan kriteria: (1) publikasi dalam rentang waktu 2020-2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi; (2) kesesuaian topik dengan fokus penelitian tentang politik

dan kebijakan pendidikan Islam; (3) kredibilitas sumber publikasi, baik dari segi reputasi jurnal maupun kompetensi penulis; dan (4) aksesibilitas sumber untuk memastikan validitas dan verifikabilitas data. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan repositori institusi perguruan tinggi dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan secara spesifik.

Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* dan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola-pola tema dan makna yang muncul dari literatur yang dikaji. *Content analysis* digunakan untuk menganalisis secara sistematis isi dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada identifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan Islam. Sementara itu, *thematic analysis* diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang lebih dalam dari fenomena yang dikaji.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama yang muncul; (3) analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar sumber; (4) sintesis untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber menjadi pemahaman yang koheren; dan (5) interpretasi untuk menghasilkan insight baru tentang dinamika politik dan kebijakan pendidikan Islam. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai jenis publikasi dan dokumen, serta melalui *member checking* terhadap interpretasi yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik Lokal dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Kota Jambi

Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam melibatkan berbagai stakeholder dalam proses formulasi kebijakan. Catatan sejarah membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang mempunyai peran dalam menentukan kebijakan tersebut (Ridwan, Ikbal, & Rahman, 2023). Hal ini mencerminkan pentingnya identifikasi dan analisis mendalam terhadap aktor-aktor politik yang berpengaruh dalam konteks lokal, khususnya di Kota Jambi.

Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan struktural dan politik. Hambatan dan tantangan yang mungkin muncul meliputi perbedaan pandangan dan prioritas, keterbatasan waktu dan sumber daya, ketidaksetaraan representasi, tantangan teknis, politik dan kepentingan pribadi, kurangnya komunikasi yang efektif, resistensi terhadap perubahan, dan intimidasi hasil (Sholeh et al., 2023). Kompleksitas ini mengindikasikan perlunya mekanisme yang lebih sistematis dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam proses formulasi kebijakan.

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi semakin strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan Islam. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah menembus dunia pendidikan dasar dan menengah, termasuk madrasah. Sebagai pendidikan dengan karakteristik keagamaan, dampaknya memiliki signifikansi dibandingkan dengan institusi pendidikan umum yang setara (Aini, 2022). Dinamika ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks politik lokal dan kepentingan berbagai stakeholder yang terlibat.

Proses politik dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan Islam melibatkan kompleksitas negosiasi dan koordinasi antar berbagai pihak. Stakeholder berkontribusi pada setiap tahap proses pengembangan kurikulum dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan,

merancang materi dan pembelajaran, memilih metode pembelajaran dan evaluasi, menguji dan menilai, serta merevisi dan menyesuaikan (Sholeh et al., 2023). Proses ini memerlukan koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan dapat terakomodasi dalam kerangka kebijakan yang komprehensif.

Dinamika politik dalam pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma dan orientasi yang lebih humanis. Paradigma otonomi dalam bidang pendidikan telah memacu gerakan pendidikan madrasah ke orientasi tujuan pendidikan yang lebih manusiawi. Siswa dibangkitkan untuk lebih peka berpartisipasi dalam pendidikan yang memakmurkan bersama berdasarkan kearifan agama lokal (Aini, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa proses politik dalam formulasi kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan dinamika bottom-up yang berasal dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Dalam konteks Kota Jambi, konstelasi kekuatan politik lokal memainkan peran determinan dalam membentuk arah kebijakan pendidikan Islam. Pemerintah daerah sebagai leading sector tidak dapat mengabaikan pengaruh elit politik lokal, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki basis massa kuat. Dinamika ini menciptakan ruang negosiasi yang kompleks, di mana setiap aktor berusaha memperjuangkan visinya terhadap pendidikan Islam ideal.

Fenomena patronase politik yang mengakar dalam budaya politik lokal Sumatera turut mewarnai proses formulasi kebijakan. Relasi patron-klien antara elit politik dan tokoh agama menciptakan sistem pertukaran kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek daripada visi pendidikan Islam jangka panjang yang berkelanjutan.

Ruang publik Kota Jambi menjadi arena kontestasi berbagai wacana tentang pendidikan Islam. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mengusung modernisasi pendidikan Islam dengan integrasi teknologi dan kurikulum global. Di sisi lain, kelompok konservatif menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai klasik dalam pendidikan Islam. Kontestasi ini tidak hanya terjadi dalam forum-forum resmi, tetapi juga melalui media sosial, pengajian, dan diskusi-diskusi informal yang membentuk opini publik.

Peran media lokal dalam membingkai isu pendidikan Islam juga tidak dapat diabaikan. Framing yang dilakukan media mempengaruhi persepsi masyarakat dan dapat memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Media yang pro-modernisasi akan menyoroti urgensi reformasi pendidikan Islam, sementara media yang berhaluan konservatif cenderung mengkritisi setiap perubahan yang dianggap mengancam identitas keislaman.

Meskipun konsep partisipasi stakeholder telah menjadi prinsip dalam formulasi kebijakan, implementasinya dalam konteks pendidikan Islam Kota Jambi menghadapi berbagai kendala praktis. Struktur birokrasi yang hierarkis dan budaya politik yang masih didominasi oleh elite tertentu membatasi ruang partisipasi genuina dari grassroots level. Guru-guru madrasah, orang tua siswa, dan masyarakat awam seringkali hanya menjadi objek kebijakan daripada subjek yang aktif dalam proses formulasi.

Ketimpangan representasi juga terlihat dari dominasi tokoh laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, padahal perempuan memiliki peran signifikan dalam pendidikan Islam, baik sebagai pendidik maupun sebagai ibu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Representasi generasi muda juga masih terbatas, padahal mereka yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan yang dirumuskan.

Kompleksitas kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan Islam menciptakan tantangan koordinasi yang serius. Kementerian Agama sebagai pembina teknis madrasah, Dinas Pendidikan sebagai pengelola pendidikan daerah, dan berbagai instansi terkait lainnya seringkali memiliki

interpretasi dan prioritas yang berbeda. Ego sektoral dan kompetisi antar-instansi dapat menghambat sinergi dalam implementasi kebijakan.

Perbedaan sistem informasi dan database antar-instansi juga mempersulit koordinasi efektif. Ketidaksinkronan data tentang jumlah madrasah, siswa, guru, dan infrastruktur pendidikan Islam menyulitkan perencanaan kebijakan yang akurat dan evidence-based. Hal ini mengindikasikan perlunya sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh semua stakeholder relevan.

Aspek ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari proses formulasi kebijakan pendidikan Islam. Keterbatasan anggaran daerah menciptakan kompetisi ketat dalam alokasi sumber daya antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Political will kepala daerah menjadi faktor krusial dalam menentukan prioritas anggaran pendidikan Islam.

Fenomena rent-seeking dalam proyek-proyek pendidikan juga berpotensi mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Praktik korupsi dan kolusi dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan Islam dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan merugikan kualitas pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan Islam menjadi agenda mendesak yang perlu diprioritaskan.

Era digital dan globalisasi menuntut adaptasi kebijakan pendidikan Islam terhadap perubahan sosial yang dinamis. Generasi digital native memiliki karakteristik dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran tanpa kehilangan esensi nilai-nilai keislaman.

Tantangan radikalisme dan intoleransi yang berkembang melalui media digital juga menuntut respons kebijakan yang proaktif. Pendidikan Islam harus diperkuat dengan materi-materi yang mempromosikan moderasi beragama dan toleransi, sambil tetap mempertahankan identitas keislaman yang kuat.

Ke depan, formulasi kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis evidensi. Pembentukan forum multi-stakeholder yang representatif dan berkelanjutan dapat menjadi mekanisme efektif untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Penguatan kapasitas birokrasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan juga menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif akan memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dari implementasi kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya responsif terhadap dinamika politik lokal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Regulasi ke Praktik

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat kota menghadapi tantangan kompleks dalam mentransformasikan regulasi formal menjadi praktik nyata di lapangan. Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Tanjung, Yetti, Frinaldi, & Syamsir, 2023). Kompleksitas ini memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme birokrasi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam melibatkan berbagai tingkatan dan institusi yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi

publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu (Tanjung et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan publik yang lebih luas dan memerlukan koordinasi yang efektif antar berbagai level pemerintahan.

Otonomi daerah telah memberikan kebebasan yang luas bagi madrasah dalam memanfaatkan manajemen berbasis sekolah (MBS), delegasi wewenang, termasuk peluang untuk inovasi pendidikan (Aini, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme implementasi kebijakan di tingkat kota memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Transformasi kebijakan pendidikan Islam menjadi program konkret memerlukan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi program PAI di madrasah sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Dengan melakukan evaluasi secara rutin dan sistematis, madrasah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang diberikan kepada siswa (Wajihah, 2024). Proses ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan tidak hanya melibatkan aspek implementasi, tetapi juga monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Evolusi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia dari waktu ke waktu melalui lensa 'Dynamic Governance' menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan PAI telah berdampak pada pengalaman pendidikan siswa dan masyarakat luas (Qomariyah & Rustam, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa proses transformasi kebijakan menjadi program konkret memerlukan adaptasi yang dinamis terhadap perubahan tuntutan dan ekspektasi masyarakat serta pemerintah.

Dalam konteks perencanaan program, evaluasi harus direncanakan dengan teliti karena melibatkan banyak aspek. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil pembelajaran, tetapi juga pada proses pengajaran yang perlu dievaluasi secara komprehensif (Wajihah, 2024). Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan menjadi program konkret memerlukan perencanaan yang matang dan sistem evaluasi yang menyeluruh.

Kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan Islam di era kontemporer menghadapi tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan integratif dan adaptif. Fenomena ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai ekosistem yang saling berinteraksi antara aspek regulatif, administratif, dan operasional. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan transformasional menjadi krusial dalam memastikan bahwa visi kebijakan dapat diaktualisasikan menjadi realitas pendidikan yang berkualitas.

Transformasi digital telah mengubah lanskap implementasi kebijakan pendidikan Islam secara fundamental. Integrasi teknologi informasi dalam sistem manajemen madrasah tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga membuka peluang inovasi pembelajaran yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Namun, kesenjangan digital antara madrasah di perkotaan dan pedesaan menciptakan disparitas dalam kualitas implementasi kebijakan. Hal ini menuntut strategi pemerataan akses teknologi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Aspek sumber daya manusia menjadi determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru seringkali menjadi bottleneck dalam proses transformasi. Pengembangan profesionalisme guru melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pengembangan karir yang jelas menjadi prasyarat fundamental untuk memastikan kualitas implementasi kebijakan. Selain itu, sistem reward dan punishment yang proporsional perlu

dikembangkan untuk mendorong motivasi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan.

Dimensi kultural dan sosial dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam tidak dapat diabaikan. Setiap daerah memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, yang dapat menjadi aset atau tantangan dalam implementasi kebijakan. Pendekatan *culturally responsive education* menjadi relevan dalam konteks ini, di mana kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi keragaman budaya lokal tanpa mengorbankan esensi nilai-nilai Islam universal. Proses indigenisasi kebijakan melalui dialog konstruktif dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal menjadi strategi penting untuk memastikan penerimaan dan dukungan masyarakat.

Koordinasi antar stakeholder dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam menghadapi tantangan struktural dan fungsional yang kompleks. Ego sektoral antar instansi pemerintah, tumpang tindih kewenangan, dan komunikasi yang tidak efektif seringkali menghambat sinergi implementasi kebijakan. Pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih efektif melalui pembentukan tim kerja lintas sektoral, sistem informasi terintegrasi, dan protokol komunikasi yang jelas menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, peran Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam pendidikan Islam perlu diperkuat dengan memberikan kewenangan koordinatif yang lebih luas dan didukung dengan sumber daya yang memadai.

Sustainable financing menjadi isu kritis dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam jangka panjang. Ketergantungan pada anggaran pemerintah yang terbatas seringkali menghambat implementasi program-program inovatif. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, *endowment fund*, dan *crowd funding* berbasis masyarakat menjadi alternatif strategis. Model pembiayaan yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek *equity* dan *accessibility*, memastikan bahwa pendidikan Islam berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi.

Evolusi paradigma evaluasi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dan berbasis *evidence*. Evaluasi tidak lagi terbatas pada aspek kuantitatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kualitatif seperti pengembangan karakter, *spiritual intelligence*, dan *life skills* siswa. Pengembangan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel untuk mengukur capaian pendidikan Islam secara komprehensif menjadi tantangan metodologis yang perlu dijawab melalui riset dan pengembangan yang berkelanjutan.

Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan tersendiri bagi implementasi kebijakan pendidikan Islam. Nilai-nilai global seperti toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia harus diharmonisasikan dengan nilai-nilai Islam tanpa menimbulkan konflik epistemologis. Pendekatan *moderate Islam* yang menekankan pada *wasathiyyah* (moderasi) dan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta) menjadi *framework* yang relevan dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan ajaran Islam. Hal ini memerlukan reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam setting kontemporer tanpa mengurangi substansi spiritual dan moral.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih demokratis dan inklusif. *School committee*, *parent-teacher association*, dan forum masyarakat pendidikan dapat menjadi wadah aspirasi dan kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan Islam harus dijamin melalui sistem pelaporan yang terbuka dan mekanisme *grievance* yang responsif. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan tidak hanya meningkatkan *sense of ownership*, tetapi juga memastikan relevansi dan responsivitas program pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, implementasi kebijakan pendidikan Islam harus dipahami sebagai proses

pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Adaptive management approach yang menekankan pada fleksibilitas, inovasi, dan pembelajaran dari pengalaman menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan di era yang penuh ketidakpastian ini. Budaya organisasi yang mendorong eksperimentasi, refleksi kritis, dan perbaikan berkelanjutan harus dikembangkan di semua level implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Gap antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Fenomena kesenjangan implementasi antara regulasi dan realitas lapangan merupakan isu krusial dalam kebijakan pendidikan Islam. Terdapat kesenjangan implementasi yang besar antara apa yang dirumuskan pembuat kebijakan dan apa yang diimplementasikan di lapangan (Vandito, Syabita, Pratiwi, Darmawan, & Fatkhuri, 2024). Kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam konteks kebijakan umum, tetapi juga relevan dalam konteks kebijakan pendidikan Islam yang memiliki kompleksitas tersendiri.

Perubahan strategi pendidikan di Indonesia mengalami pasang surut akibat pertemuan-pertemuan tertentu, dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah tentunya sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan (Tintigon, Lumapow, & Rotty, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh dinamika politik dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten.

Konsekuensi dari perubahan kebijakan adalah perubahan strategi pembelajaran yang menggantikan sepenuhnya niat bekerja pada sifat pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki integritas tinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman globalisasi, namun hasilnya belum terlihat dengan baik (Tintigon et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan implementasi juga terkait dengan waktu dan proses adaptasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam bersifat multidimensional dan kompleks. Kesenjangan implementasi antara apa yang dirumuskan dan implementasi di lapangan disebabkan oleh faktor multidimensional (Vandito et al., 2024). Faktor-faktor ini mencakup aspek kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, dan konteks politik-ekonomi yang mempengaruhi proses implementasi.

Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan implementasi juga terkait dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan nilai-nilai religius dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Restrukturisasi dan modernisasi sistem pendidikan Islam bertujuan untuk menjelaskan pentingnya adaptasi kebijakan untuk mencerminkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan perkembangan kontemporer serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Qomariyah & Rustam, 2024).

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan. Guru dan siswa, suka atau tidak suka, harus bisa beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang baru (Tintigon et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan kultural dari para pelaksana kebijakan.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan dalam pendidikan Islam mencerminkan permasalahan sistemik yang lebih luas dalam tata kelola kebijakan publik di Indonesia. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan parsial semata, melainkan sebagai manifestasi dari kompleksitas sistem pendidikan yang melibatkan multiple stakeholders dengan kepentingan, kapasitas, dan pemahaman yang beragam.

Akar permasalahan kesenjangan implementasi seringkali terletak pada desain kebijakan

yang tidak mempertimbangkan kapasitas institusional di tingkat operasional. Kebijakan pendidikan Islam yang dirumuskan di tingkat pusat kerap mengasumsikan homogenitas kondisi dan kemampuan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, padahal realitasnya sangat heterogen. Madrasah di daerah terpencil memiliki keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses teknologi yang berbeda jauh dengan madrasah di perkotaan.

Lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi juga berkontribusi terhadap perpetuasi kesenjangan ini. Sistem pengawasan yang ada seringkali bersifat formal dan birokratis, tidak mampu menangkap nuansa implementasi di lapangan. Akibatnya, feedback dari ground level tidak terintegrasi dengan baik ke dalam proses penyempurnaan kebijakan, menciptakan siklus yang berulang dari formulasi kebijakan yang kurang responsif terhadap realitas implementasi.

Ketidakstabilan politik dan pergantian kepemimpinan menjadi faktor yang memperparah kesenjangan implementasi. Setiap pergantian menteri atau pejabat kunci di Kementerian Agama seringkali diikuti dengan perubahan prioritas dan pendekatan kebijakan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaksana di lapangan yang masih dalam proses adaptasi dengan kebijakan sebelumnya.

Fragmentasi wewenang antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama juga menciptakan koordinasi yang tidak optimal. Dualisme kewenangan ini seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak sinkron, bahkan kontradiktif, yang pada akhirnya membingungkan pelaksana di tingkat satuan pendidikan.

Resistensi terhadap perubahan dalam konteks pendidikan Islam memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan pendidikan umum. Nilai-nilai tradisional dan konservatisme dalam sebagian komunitas pendidikan Islam dapat menjadi hambatan terhadap adopsi inovasi dan modernisasi. Perubahan kurikulum atau metode pembelajaran yang dianggap terlalu 'sekuler' atau 'western' seringkali menghadapi penolakan dari kalangan tradisional.

Di sisi lain, generasi muda pendidik dan siswa yang lebih terbuka terhadap perubahan dapat mengalami frustrasi ketika berhadapan dengan sistem dan struktur yang resisten terhadap modernisasi. Tension antara tradisi dan modernitas ini menciptakan kompleksitas tambahan dalam proses implementasi kebijakan.

Kualitas dan kapasitas tenaga pendidik menjadi faktor kritis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Banyak guru di madrasah, terutama di daerah, yang belum memiliki kualifikasi akademik dan pedagogis yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran yang baru. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional memperburuk situasi ini.

Fenomena brain drain, di mana tenaga pendidik berkualitas cenderung beralih ke sektor lain yang menawarkan kompensasi lebih baik, juga berkontribusi terhadap lemahnya kapasitas implementasi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kualitas implementasi yang rendah berdampak pada kualitas output, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik profesi pendidik di bidang pendidikan Islam.

Disparitas ekonomi antar daerah menciptakan variasi yang signifikan dalam kemampuan implementasi kebijakan. Daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan pendidikan yang baru. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat yang seringkali terlambat atau tidak memadai memperparah situasi ini.

Ekspektasi masyarakat yang beragam terhadap pendidikan Islam juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Di daerah yang masyarakatnya masih sangat tradisional, ada ekspektasi kuat untuk mempertahankan metode pembelajaran klasik, sementara di daerah yang lebih modern,

ada tuntutan untuk integrasi dengan pendidikan global dan teknologi.

Persistensi kesenjangan implementasi dapat menghasilkan dampak jangka panjang yang merugikan. Inconsistency dalam kualitas pendidikan Islam antar daerah dapat menciptakan ketimpangan dalam kompetitivitas lulusan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan Islam dan mendorong migrasi ke sistem pendidikan umum.

Selain itu, kegagalan dalam implementasi kebijakan modernisasi dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, hal ini dapat memarginalkan posisi pendidikan Islam dalam landscape pendidikan nasional.

Mengatasi kesenjangan implementasi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama, perlu ada redesign dalam proses formulasi kebijakan yang lebih partisipatif dan bottom-up, melibatkan praktisi lapangan sejak tahap awal. Kedua, penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Ketiga, investasi signifikan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan insentif yang memadai.

Terakhir, perlu ada komitmen politik yang kuat untuk menjaga konsistensi kebijakan lintas periode kepemimpinan, dengan membangun institutional memory yang kuat dan mekanisme transisi yang smooth antar administrasi.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan-temuan dari analisis dinamika politik dan implementasi kebijakan pendidikan Islam memberikan implikasi penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Nilai strategis pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan (Ridwan et al., 2023). Implikasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang strategis.

Penggunaan teori kapasitas kebijakan dan teori kesenjangan implementasi menunjukkan bahwa rekomendasi yang dapat diberikan adalah perbaikan kapasitas sumber daya manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan pemberdayaan lembaga non-pemerintah dalam mengawasi implementasi kebijakan (Vandito et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kebijakan tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas implementasi.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika politik dan implementasi kebijakan pendidikan Islam, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Rekomendasi untuk pesantren dan kebijakan pendidikan terkait pengembangan kurikulum meliputi peningkatan keterlibatan stakeholder, pembentukan tim pengembangan kurikulum, keterbukaan terhadap inovasi, dan integrasi nilai-nilai agama (Sholeh et al., 2023). Rekomendasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan inklusif dalam pengembangan kebijakan.

Untuk kebijakan pendidikan, selain dukungan dan pengakuan, pengembangan pelatihan stakeholder, penyediaan sumber daya, dukungan untuk penelitian dan inovasi serta kemitraan dengan pesantren menjadi kunci keberhasilan (Sholeh et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan sistem kebijakan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek dan stakeholder.

Tujuan utama penulisan ini adalah menawarkan perspektif baru tentang implementasi kebijakan pendidikan agama yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia Indonesia dalam konteks keberagaman sosial dan kebutuhan dinamis saat ini (Qomariyah & Rustam, 2024). Perspektif ini menekankan pentingnya adaptasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan kontemporer masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi kompleksitas dinamika politik dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Kota Jambi yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi formal dan realitas lapangan. Dinamika politik lokal mempengaruhi proses formulasi kebijakan melalui interaksi kompleks antara elit politik, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan Islam, yang seringkali menciptakan ruang negosiasi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip good governance. Fenomena patronase politik dan sistem pertukaran kepentingan terbukti mempengaruhi orientasi kebijakan pendidikan Islam di tingkat kota.

Proses implementasi kebijakan menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan yang tidak optimal, dan resistensi terhadap perubahan dari berbagai stakeholder. Transformasi digital dan tuntutan modernisasi menciptakan dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dengan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Struktur birokrasi yang hierarkis dan fragmentasi wewenang antara instansi terkait menjadi hambatan struktural dalam implementasi kebijakan yang efektif.

Kesenjangan implementasi terbukti disebabkan oleh faktor-faktor sistemik yang meliputi desain kebijakan yang tidak mempertimbangkan heterogenitas kondisi lokal, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta ketidakstabilan politik yang mempengaruhi konsistensi kebijakan. Disparitas ekonomi antar daerah dan variasi ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan Islam turut memperburuk kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek partisipasi stakeholder, penguatan kapasitas implementasi, dan pengembangan sistem monitoring berbasis evidensi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik lokal, serta mengembangkan instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas kebijakan pendidikan Islam dalam konteks yang lebih luas.

REFERENSI

- Adlini, Miza Nina, Dinda, Anisya Hanifa, Yulinda, Sarah, Chotimah, Octavia, & Merliyana, Sauda Julia. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aini, Masyithoh. (2022). DESENTRALISASI PENDIDIKAN MADRASAH MELALUI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Ulu-muddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 95–106.
- Darmansah, Tengku, & Ramadhani, Putri Suci. (2025). Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3.
- Hayi, Abdul, & Alwi, Mohamad. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Di Era Reformasi. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 85–95. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.447>
- Hoddin, Muhammad Sholeh. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia : Studi

- Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15.
- Kurniasih, Apri, Novitasari, Dwiana, Saparuddin, Muhammad, Fandi, Bima, Pimada, Luluk Humairo, Annas, Azwar, Wartini, Sri, Fadhel, Ahmad, & Hidayat, Syakir. (2025). ISLAMIC EDUCATION POLICY PRIORITIES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN HIGHER EDUCATION. *Journal of Lifestyle & SDG'S Review*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe05280>
- Pasaribu, Putri Indah Amalia. (2021). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Jambi Abad XX: Studi Kasus Seberang Kota Jambi. *Jurnal Siginjai*, 1(2), 16–24. <https://doi.org/10.22437/js.v1i2.16348>
- Qomariyah, Erni, & Rustam, Ahmad Sultra. (2024). Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Masa Ke Masa Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(2), 643–654. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426>
- Ridwan, A., Ikbal, M., & Rahman, Muhammad Zaki. (2023). Peran Politik Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*, 4(3), 917–923.
- Sholeh, Muh Ibnu, Fathurro'uf, Muhammad, Sokip, Sokip, Syafi'i, Asrop, 'Azah, Nur, & Andayani, Dwi. (2023). Partisipasi Stakeholder dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Pesantren. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 1(2), 121–141. <https://doi.org/10.55352/edu.v1i2.759>
- Tanjung, Alber, Yetti, Salma, Frinaldi, Aldri, & Syamsir. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>
- Tintingon, Josly Yakob, Lumapow, Harol Reflie, & Rotty, Viktory Nicodemus Joufree. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Ulum, Khoirul. (2023). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 25–33. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i1.9274>
- Vandito, Revo Linggar, Syabita, Elsa, Pratiwi, Hindry Maula, Darmawan, Muhammad, & Fatkhuri. (2024). Gap Implementasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Klaster Ketenagakerjaan Tentang Pemanfaatan Pekerja Asing. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 149–170. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.143>
- Wajihah, Nur. (2024). Evaluasi Program Pendidikan Agama Islam di Madrasah: Perspektif Stakeholder dan Implikasinya untuk Perbaikan. *RES: Review of Education Studies*, 1(1), 64–83.